RENCANA AKSI KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												Keterangan
		Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4								Tri 1			Tri 2			Tri 3			Tri 4			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6		7	8	9	10												11
1. Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				3,31	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	94	Persen		Rp 2.329.990.950															
						1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1. Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	29	Domain / Sub Domain		Rp 319.465.670														
						1.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.1 Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	29	domain / sub domain	Pengelolaan (pemberian nama domain, pengawasan dan evaluasi domain di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak)	Rp 109.184.330	SUB SUBSTANSI SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI												
						1.2 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.2 Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5	OPD	Pembangunan jaringan intra pemerintah daerah (jaringan fiber optic)	Rp 210.281.340	SUB SUBSTANSI SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI												
						2. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2. Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	1	Aplikasi / Layanan Publik		Rp 2.010.525.280														
						2.1 Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	2.2 jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	30	OPD	Operasional server / pusat data pemerintah daerah	Rp 1.473.314.480	SUB SUBSTANSI SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI												
						2.2 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.3 Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan	2	Aplikasi	1) Pengembangan aplikasi LPPD, 2) Pengembangan Aplikasi POSLIB, 3) Pengembangan Aplikasi Satu Data Kota Pontianak	Rp 125.390.000	SUB SUBSTANSI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN APLIKASI INFORMATIKA												
						2.3 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2.4 Jumlah Aplikasi / Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1	Aplikasi	Evaluasi serta Pengembangan aplikasi interoperabilitas	Rp 3.676.000	SUB SUBSTANSI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN APLIKASI INFORMATIKA												
						2.4 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.5 Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	25	OPD	1) Perubahan Masterplan Smart City ; 2) Penyusunan SK Dewan Pontianak Smart City, 3) Penyusunan Tim Teknis Pontianak Smart City Koordinasi, 4) Pemberdayaan Forum Pontianak Smart City 5) monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pontianak Smart City	Rp 323.374.800	SUB SUBSTANSI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN APLIKASI INFORMATIKA												
						2.5 Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2.6 Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	5	sistem/OPD	Penyediaan akses komunikasi melalui jaringan intra pemerintah daerah	Rp 54.240.000	SUB SUBSTANSI SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI												
						2.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	2.7 Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	1	Laporan	1) Penyusunan Draft SK Evaluator Internal SPBE, 2) Koordinasi, Analisis dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota Pontianak	Rp 30.530.000	SUB SUBSTANSI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN APLIKASI INFORMATIKA												
1. Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				3,31	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Cukup Baik	Indeks		Rp 169.013.406														
						3. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3. Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	1	area		Rp 144.378.992														
						3.1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.1 Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	1	dokumen	Penyusunan draft Perwa terkait sistem keamanan	Rp 7.000.000	SEKSI PERSANDIAN DAN KEAMANAN SISTEM INFORMASI												
						3.2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.2 jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	24	sistem	Pemeriksaan / audit sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Rp 41.450.000	SEKSI PERSANDIAN DAN KEAMANAN SISTEM INFORMASI												
						3.3 Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3.3 jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem	6	sistem / kegiatan	Pelaksanaan pengamanan sistem elektronik / kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Rp 86.504.992	SEKSI PERSANDIAN DAN KEAMANAN SISTEM INFORMASI												
						3.4 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3.4 Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	7	Sertifikat elektronik	Penerbitan Sertifikat Elektronik / Tanda Tangan Digital untuk Kepala Perangkat Daerah / Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Rp 9.424.000	SEKSI PERSANDIAN DAN KEAMANAN SISTEM INFORMASI												

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												Keterangan
			Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4										Tri 1			Tri 2			Tri 3			Tri 4			
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		2			3		4		5		6		7	8	9	10												11
							3. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		3. Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS)		5	Perangkat Daerah		Rp 24.634.414														
								3.1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		3.1 Jangka waktu Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12	bulan	Penyusunan draft Perwa terkait tata naskah dinas elektronik dan penggunaan tanda tangan elektronik	Rp 24.634.414	SEKSI PERSANDIAN DAN KEAMANAN SISTEM INFORMASI											
2.	Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik TOTAL DARI NILAI PER UNSUR* TOTAL UNSUR YANG TERISI *Unsur SKM	X NILAI PENIMBANG			Baik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		90	persen		Rp 593.917.000													
							4. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		4. Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat		12	informasi		Rp 593.917.000													
								4.1 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		4.1 Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	9	konten	Pembuatan konten informasi dan penyebaran informasi melalui media sosial	Rp 292.028.000	SUB SUBSTANSI PENGOLAHAN INFORMASI DAN KEMITRAAN MEDIA											
								4.2 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		4.2 Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	2	kali / media	Pengelolaan website Pemerintah Kota Pontianak dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak serta pelaksanaan diseminasi informasi	Rp 47.927.800	SUB SUBSTANSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PUBLIK											
								4.3 Pelayanan Informasi Publik		4.3 Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	135	pengaduan	Pengelolaan layanan pengaduan publik	Rp 100.574.150	SUB SUBSTANSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PUBLIK											
								4.4 Layanan Hubungan Media		4.4 Jumlah siaran pers yang dilakukan	3	kali	Pelaksanaan siaran pers / penyebaran informasi melalui media cetak, media online dan media elektronik	Rp 58.030.000	SUB SUBSTANSI PENGOLAHAN INFORMASI DAN KEMITRAAN MEDIA											
								4.5 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		4.5 jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	2	komunitas	Pembinaan dan pemberdayaan komunitas (Kelompok Informasi Masyarakat)	Rp 23.450.000	SUB SUBSTANSI PENGOLAHAN INFORMASI DAN KEMITRAAN MEDIA											
								4.6 Manajemen Komunikasi Krisis		4.6 jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	3	dokumen	Pengelolaan komunikasi krisis di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	Rp 48.272.250	SUB SUBSTANSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PUBLIK											
								4.7 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		4.7 Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	12	informasi	Pelayanan informasi dan dokumentasi melalui media PPID Kota Pontianak	Rp 23.634.800	SUB SUBSTANSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PUBLIK											
2.	Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik TOTAL DARI NILAI PER UNSUR* TOTAL UNSUR YANG TERISI *Unsur SKM	X NILAI PENIMBANG			Baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak		92	persen		Rp 462.931.079													
							5. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota		5. Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbarukan/terupdate		800	data		Rp 462.931.079													
								5.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		5.1 Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan Forum Data Kota	4	Kali	1) Koordinasi, sinkronisasi dan pengumpulan data statistik sektoral ; 2) Forum Data Kota Pontianak	Rp 135.046.230	SUB SUBSTANSI PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK SEKTORAL											
								5.2 Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		5.2 Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yang diselenggarakan	0	kali	Pelaksanaan sosialiasi dan pendampingan terkait pengumpulan data statistik sektoral	Rp -	SUB SUBSTANSI ANALISA, EVALUASI DAN PUBLIKASI DATA STATISTIK SEKTORAL											
								5.3 Membangun Metadata Statistik Sektoral		5.3 Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	100	buku	Pengumpulan kuisioner metadata dan penyusunan Buku Metadata	Rp 41.590.000	SUB SUBSTANSI PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK SEKTORAL											
								5.4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		5.4 Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka	250	buku	Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data statistik sektoral, data dinamis dan Pontianak Dalam Angka	Rp 71.520.000	SUB SUBSTANSI PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK SEKTORAL											
								5.5 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		5.5 1) Jumlah Buku Profil Daerah;	100	buku	Penyusunan profil Kota Pontianak	Rp 214.774.849	SUB SUBSTANSI ANALISA, EVALUASI DAN PUBLIKASI DATA STATISTIK SEKTORAL											
										2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak;	800	data	Monitoring, evaluasi serta Updating data statistik sektoral													
										3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral	0	kali	Publikasi data statistik sektoral													

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan											Keterangan
		Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4								Tri 1			Tri 2			Tri 3			Tri 4		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6		7	8	9	10												11
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	94	persen		Rp 5.488.765.184															
						6. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22	Dokumen		Rp 31.120.600															
						6.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.1 Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan: 1) Proses Bisnis; 2) Rencana Kinerja Tahunan; 3) Rencana Kinerja Tahunan Perubahan; 4) Perjanjian Kinerja ; 5) Perjanjian Kinerja Perubahan; 6) Rencana Kerja; 7) Manajemen Resiko	Rp 8.011.800	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN												
						6.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.2 Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	60	Sub kegiatan	Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan rencana kerja anggaran	Rp 2.800.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN												
						6.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.3 Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	30	Sub kegiatan	Pelaksanaan Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan rencana perubahan anggaran /sub kegiatan	Rp 4.300.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN												
						6.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6.4 Jumlah kegiatan pada dokumen DPA SKPD yang disusun	13	Kegiatan	Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Rp 2.300.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN												
						6.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6.5 Jumlah kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	12	Kegiatan	Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perubahan	Rp 2.300.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN												
						6.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.6 Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5	Laporan	Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah, LPPD, Bahan LKPJ Tahunan, Laporan SPIP dan Reformasi Birokrasi	Rp 5.923.800	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN												
						6.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.7 Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	Laporan	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan 1, Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan 2, Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan 3, Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan 4, Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Semester I, Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Semester II.	Rp 5.485.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN												
						7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7. Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	bulan		Rp 4.547.257.284															
						7.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.1 Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan	12	bulan	Penyediaan gaji dan tambahan penghasilan ASN	Rp 4.257.730.284	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN												
						7.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.2 Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	bulan	Penyediaan jasa pelaksanaan tugas ASN (tenaga non ASN)	Rp 21.600.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN												
						7.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	7.3 Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	bulan	Pelaksanaan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	Rp 253.800.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN												
						7.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.4 Jangka waktu pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	bulan	Pelaksanaan koordinasi akuntansi keuangan perangkat daerah	Rp 3.180.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN												
						7.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Penyusunan CALK Perangkat Daerah	Rp 1.089.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN												
						7.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	7.6 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12	Laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah (LRA, LO, LPE dan Neraca)	Rp 9.858.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN												
						8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8. Jangka waktu pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	bulan		Rp 70.980.000															
						8.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.1 Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	85	stel	Pengadaan pakaian dinas ASN dan Non ASN	Rp 52.980.000	SUBBAG UMUM DAN APARATUR												
						8.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.2 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	3	orang	Pelaksanaan diklat dan bimtek ASN	Rp 18.000.000	SUBBAG UMUM DAN APARATUR												

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Aksi	Anggaran (Rp)	Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												Keterangan
		Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4								Tri 1			Tri 2			Tri 3			Tri 4			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3				4	5	6		7	8	9	10												11
3.						9. Administrasi Umum	9. Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	bulan		Rp 230.913.286															
						9.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	9.1 Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor perangkat daerah	Rp 8.001.268	SUBBAG UMUM DAN APARATUR													
						9.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	Unit	Penyediaan Kendaraan Hias Untuk Event Kota Pontianak	Rp -	SUBBAG UMUM DAN APARATUR													
						9.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	0	Unit	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor perangkat daerah	Rp -	SUBBAG UMUM DAN APARATUR													
						9.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.2 Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12	bulan	Penyediaan makan minum rapat, alat kebersihan dan logistiki kantor lainnya	Rp 136.117.813	SUBBAG UMUM DAN APARATUR													
						9.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.3 Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen perangkat daerah	Rp 27.541.955	SUBBAG UMUM DAN APARATUR													
						9.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.4 Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	Langganan Koran dan bahan bacaan lainnya	Rp 8.880.000	SUBBAG UMUM DAN APARATUR													
						9.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.5 Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12	bulan	Penyediaan jasa / layanan untuk rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ke luar daerah	Rp 50.372.250	SUBBAG UMUM DAN APARATUR													
						10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10. Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	32	unit		Rp 237.261.648														
						10.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.1 Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0	unit	Pengadaan meja, kursi, lemari dan mebel lainnya	Rp -	SUBBAG UMUM DAN APARATUR													
						10.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.2 Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32	unit	Pengadaan komputer, laptop dan peralatan / mesin lainnya	Rp 237.261.648	SUBBAG UMUM DAN APARATUR													
						10.3 Pengadaan Aset Tak Berwujud	10.3 Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud	0	unit	-	Rp -	SUBBAG UMUM DAN APARATUR													
						11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11. Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan		Rp 293.297.120														
						11.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.1 Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12	bulan	Penyediaan materai dan biaya pengiriman	Rp 5.000.000	SUBBAG UMUM DAN APARATUR													
						11.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	11.2 Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12	bulan	Pembayaran langganan internet / indihome	Rp 31.200.000	SUBBAG UMUM DAN APARATUR													
						11.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.3 Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	bulan	Penyediaan jasa layanan kebersihan kantor	Rp 257.097.120	SUBBAG UMUM DAN APARATUR													
						12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12. Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	43	unit		Rp 77.935.246														
						12.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.1 Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2	unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 36.702.746	SUBBAG UMUM DAN APARATUR													
						12.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.2 Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	41	unit	Pemeliharaan peralatan dan mesin perangkat daerah	Rp 41.232.500	SUBBAG UMUM DAN APARATUR													
						12.3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.3 Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	0	unit	Rehabilitasi ringan gedung kantor	Rp -	SUBBAG UMUM DAN APARATUR													

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PONTIANAK

Drs. Zulkarnain, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660127 198603 1 009